

Memperkuat Partisipasi Politik Warga Binaan Perumahan Kelas II B Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

Abdul Wahid Safar B^{1*}, Nursam¹, Eka De Patmonsela Liuw¹, Abdul Kahar¹, Maruf Bantilan¹ Arfan¹

¹Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli



ARTICLE INFO

Received: July 20, 2024
Accepted: Agustus 01, 2024
Published: Agustus 02, 2024

*) Corresponding author:
E-mail: abdul.wahid.safar@gmail.com

Keywords:

Participation;
Prisoners;
Correctional institutions;
Lectons.

Kata Kunci:

Partisipasi;
Warga Binaan;
Lembaga perumahan;
Pilkada.



This is an open access article
under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT

This community service is carried out to provide socialization to prisoners of class II B correctional institutions in Tolitoli district in the regional head elections. The main focus of this service is to educate prisoners who are serving a period of detention regarding participation in the 2024 regional head elections. The main challenge in this service is understanding that every citizen registered as a Permanent Voter List (DPT) has the right to participate in the elections, including prisoners even though they are in detention in correctional institutions. This socialization is expected to be able to provide understanding to all prisoners that they have access guaranteed by law to participate in every election contestation. In the future, it is hoped that this activity will become a routine agenda in the same or other places to increase community literacy.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada warga binaan lembaga perumahan kelas II B Kabupaten Tolitoli pada pemilihan kepala daerah. Fokus utama dari pengabdian ini memberikan edukasi kepada warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan terkait partisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tantangan utama dalam pengabdian ini adalah bagaimana memahami bahwa setiap warga negara yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki hak untuk berpartisipasi pada pilkada termasuk warga binaan meskipun dalam masa tahanan di lembaga perumahan. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh warga binaan bahwa mereka memiliki akses yang dijamin oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam setiap kontestasi pemilihan umum. Kedepannya diharapkan kegiatan ini menjadi agenda rutin ditempat yang sama atau di tempat yang lain agar dapat meningkatkan literasi masyarakat.

Cara mensitasi artikel:

Safar B, A. W., Nursam, Liuw, E. D. P., Kahar, A., Bantilan, M. Arfan12024. Memperkuat Partisipasi Politik Warga Binaan Perumahan Kelas II B Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*. 2(3): 103-106. <http://dx.doi.org/10.56630/jenaka.v2i3.689>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum, juga dikenal sebagai Pemilu, berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh rakyat, yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka di Indonesia (Hasibuan, 2023) (Rasji et al., 2023). Pemilu ini sangat penting untuk memilih berbagai perwakilan, untuk memastikan proses demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Maninggesa, 2022). Oleh karena itu pemilihan umum di Indonesia memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu proses pelibatan masyarakat, instrumen lembaga negara yang terlibat bagian dari proses penguatan demokrasi. Dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari aspek hukum, deteksi peserta, keterlibatan lembaga, dan pengaturan pelaksanaan, yang semuanya dipengaruhi oleh

tingkat partisipasi publik (Revan et al., 2022).

Partisipasi bagian dari instrumen penting dalam kehidupan, oleh karena itu merupakan landasan utama dalam sistem demokrasi suatu negara. Salah satu indikatornya, bagaimana setiap individu memiliki akses untuk berpartisipasi dalam setiap pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu memang penting bagi demokrasi, karena mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik ((Komariah et al., 2022). Lembaga negara yang menjalankan penyelenggaraan pemilu harus mampu dijangkau oleh masyarakat dengan berbagai regulasi pendukung untuk masyarakat, sehingga mendorong keterlibatan publik, menyediakan akses informasi, dan memastikan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk mempromosikan sistem sistem demokrasi yang sehat ((Sitoh Anang, 2022).

Kabupaten Tolitoli merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Tengah, yang memiliki instansi vertikal, salah satunya Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Tolitoli. Dimana warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan sebgai terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dari kondisi tersebut, Tim PKM melakukan sosialisasi dengan tema “Memperkuat Partisipasi Politik Warga Binaan Permasyarakatan Kelas II B Kabupaten Tolitoli Pemilihan Kepala Daerah 2024”. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat hak warga binaan untuk partisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tolitoli.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024. Kegiatan berlangsung di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, 20 warga binaan lembaga permasyarakatan kelas II B Tolitoli berkumpul secara langsung untuk menerima materi dari narasumber dan berbicara tentang partisipasi dalam pemilihan daerah.

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah spanduk, materi presentasi dalam bentuk file PowerPoint yang mengandung gambar dan animasi interaktif, media laptop sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan PKM secara keseluruhan. Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga binaan lembaga permasyarakatan kelas II B Tolitoli yang sudah terdata di daftar Pemilih tetap (DPT). Tahapan pelaksanaannya kegiatan PKM tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan PKM

Tahap	Kegiatan
1	Survei lokasi kegiatan PKM
2	Diskusi dengan mitra terkait pelaksanaan PKM
3	Menyiapkan surat ijin pelaksanaan kegiatan PKM
4	Menyiapkan alat dan bahan PKM
5	Kegiatan inti PKM (pemaparan materi, diskusi, dokumentasi
6	Membuat laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tahun 2024, sebagai tahap awal di mulai diskusi dengan mitra terkait pematangan konsep pengabdian. Pengabdian dilakukan dengan pemaparan materi tentang “Memperkuat Partisipasi Politik Warga Binaan Permasyarakatan Kelas II B Kabupaten Tolitoli Pemilihan Kepala Daerah 2024”. Sebagai tahap awal dalam penyampaian materi Tim PKM diawali dengan memperkenalkan diri, selanjutnya menggali pengetahuan terkait pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Dalam proses penggalian informasi ditemukan bahwa sebagian warga binaan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pilkada, sebagian warga binaan adalah pemilih pemula sehingga menjadi tantangan untuk memberikan edukasi terkait hak mereka untuk memilih,

serta ketika ditanya lebih dalam lagi sebagian warga binaan kurang berminat untuk berpartisipasi karena bagi mereka terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah tidak memberikan dampak secara nyata bagi mereka. Setelah mengetahui kondisi lapangan Tim PKM melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait hak setiap warga negara untuk memilih meskipun kondisi ada di dalam lembaga permasyarakatan.

Negara telah memberikan fasilitas khusus kepada warga negara terdidik yang memiliki hak pilih, termasuk mereka yang berada di dalam Lapas/Rutan. Menekankan pentingnya kegiatan pendidikan politik di dalam lapas untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi politik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Wartoyo et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara Lapas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan warga binaan di lapas dapat menggunakan hak pilihnya seperti halnya masyarakat umum (Andi Arvenia TRA, 2021). Oleh karena itu Tim PKM memberikan motivasi kepada warga binaan untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih.

Selama proses penyampaian materi dari Tim PKM, warga binaan dan mitra sangat antusias mendengarkan materi yang diberikan, terjadi komunikasi langsung antara Tim PKM, warga binaan dan mitra. Disaat bersamaan terjadi diskusi yang memantik warga binaan untuk memberikan pertanyaan maupun sebaliknya. Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi selesai kemudian rangkaian acara ditutup dengan memberikan simpulan dari materi dan hasil diskusi, dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai penutup acara.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

Secara keseluruhan, acara ini berjalan lancar dan memenuhi harapan. Namun, karena keterbatasan waktu, materi yang disampaikan disesuaikan dengan waktu yang ada. Kegiatan sosialisasi ini membuat lebih mudah untuk bekerja sama dan disampaikan lebih luas. Kegiatan PKM berlangsung selama ±120 menit. Setelah kegiatan sosialisasi, diharapkan warga binaan lembaga permasyarakatan lebih memahami pentingnya hak untuk memilih dan lebih terlibat

dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

KESIMPULAN

Setelah kegiatan ini telah membuka kesadaran warga binaan lembaga permasyarakatan tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dalam upaya pemenuhan hak warga negara untuk memilih yang merupakan proses pendewasaan demokrasi Indonesia dari tingkat kabupaten hingga nasional. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan bagi warga binaan yang tidak sepenuhnya memiliki akses seperti masyarakat umum lainnya.

Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tolitoli, sosialisasi adalah bukti eksistensi civitas akademika Universitas Madako Tolitoli, terutama dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dalam memberikan kontribusi akademik sebagai pengabdian kepada masyarakat, yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun warga binaan yang sedang dilatih oleh Lembaga Permasyarakatan Tolitoli masih dapat mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah, diharapkan tingkat partisipasi warga binaan dalam pemilihan di Kabupaten Tolitoli akan meningkat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Arvenia TRA, H. D. M. (2021). Implementasi Hak Memilih Bagi Warga Binaan Lapas Kelas I Makassar Perspektif Hukum Islam. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 2(2), 276–289.
- Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 602–609. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3174>
- Komariah, K., Prastowo, F. A., & Sumartias, S. (2022). *Millennials' Participation in Democracy Practices*. <https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2021.2316597>
- Maninggesa, S. (2022). Pentingnya Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Ahkam*, 1(1), 166–176. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.749>
- Rasji, R., Patricia, V., & Putri, S. N. (2023). Analysis of Problems in the Implementation of Elections in Districts or Villages. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 622–626. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.547>
- Revan, M., Makarim, F., & Fahmi, K. (2022). Journal of Social and Policy Issues Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Sitoh Anang, M. (2022). Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat. *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 25–46. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.15>
- Wartoyo, F. X., Harlingan, D., Harjono, E., Maghribi, G., & Mulyani, R. (2024). Sosialisasi Serta Edukasi Dalam Memperkuat Partisipasi Politik Warga Binaan Permasyarakatan Menyambut Pemilihan Umum Tahun 2024. *Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia*, 7(2), 180–188.